PENGARUH INVESTASI, JUMLAH PENDUDUK DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

MAHATVA RAMADHANDI

B1011191123

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mahatva Ramadhandi
N I M	: B1011191123
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal	: Pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 2 September 2026



Mahatva Ramadhandi
NIM. B1011191123

PERTANGGUNG JAWAB TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: *Mahatva Ramadhandi*
NIM	: B1011191123
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	: Pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir adalah hasil karya penulis sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 2 Oktober 2026



Mahatva Ramadhandi
NIM. B1011191123

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Ketimpangan Pendapatan Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Mahatva Ramadhandi
B1011191123

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA)	:	30 Juni 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Restiatun, S.E., M.Si. NIP 197505212002122001	22/9 -2026	
2.	Ketua Penguji	Romi Suradi, S.EI., M.E. NIP 198610022019031004	17/9 - 2026	
3.	Anggota Penguji	Supriaman, S.Pd., M.Si. NIP 199104132023211027	19/9 -2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 06 OCT 2026
Koordinator Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

FORMULIR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini,

Dosen Pembimbing Akademik untuk Proposal mahasiswa :

Nama : Mahatva Ramadhandi

NIM : B1011191123

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Judul Proposal : Pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Proposal tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diseminarkan.

Pembimbing Tugas Akhir

Pembimbing Tugas Akhir	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Dosen Pembimbing Akademik	Dr. Restiatun,S.E.,M.Si NIP 197505212002122001	22/9 2026	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, jumlah penduduk, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2020–2024. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh berbagai dukungan, bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Rektor Universitas Tanjungpura beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Tanjungpura.
2. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan selama penulis menjalani proses pendidikan.
3. Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan serta Bapak/Ibu Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan arahan dan dukungan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Restiatun, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

5. Bapak Romi Surandi,S.EI.,M.E dan Bapak Supriaman,S.Pd.,M.Si selaku dosen penguji saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, semangat, serta kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dalam penyusunan maupun pembahasannya. Oleh karena itu, Saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi pembangunan, khususnya mengenai ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Kalimantan Barat.

Pontianak, 2 Oktober 2026



Mahatva Ramadhandi
B1011191123

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ii
PERTANGGUNG JAWAB TUGAS AKHIR iii
LEMBAR YURIDIS iv
FORMULIR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
ABSTRAK xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.1.1 Investasi (PMDN) dan Ketimpangan Pendapatan 3
1.1.2 Jumlah Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan 4
1.1.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Ketimpangan Pendapatan .. 6
1.2 Rumusan Masalah 8
1.2.1 Pernyataan Masalah 8
1.2.2 Pertanyaan Penelitian 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Kontribusi Penelitian 10
1.4.1 Kontribusi Teoritis 10
1.4.2 Kontribusi Praktis 10

BAB 2 KAJIAN LITERATUR 11
2.1 Landasan Teori 11
2.1.1 Grand Theory: Ketimpangan Pendapatan (Kurva Kuznets) 11
2.1.2 Teori Investasi dan Hubungannya dengan Ketimpangan Pendapatan 12
2.1.3 Teori Kependudukan dan Hubungannya dengan Ketimpangan Pendapatan 13
2.1.4 Teori Upah Minimum dan Hubungannya dengan Ketimpangan Pendapatan 14
2.2 Kajian Empiris 15
2.2.1 Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan 15
2.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan 15
2.2.3 Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan ... 16
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 16
2.3.1 Kerangka Konseptual 16
2.3.2 Hipotesis Penelitian 17

BAB 3 METODE PENELITIAN 18
3.1 Bentuk, Lokasi, dan Waktu Penelitian 18
3.2 Data Penelitian 18

3.3 Definisi Operasional 18
3.3.1 Definisi Operasional Variabel 18
3.4 Metode Analisis Data 19
3.4.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel 19
3.4.2 Uji Asumsi Klasik 20
3.4.3 Uji Statistik 21

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 23
4.1 Hasil Penelitian 23
4.1.1 Pemilihan Model 23
4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 24
4.1.3 Hasil Uji Regresi Data Panel 26
4.1.4 Hasil Uji Statistika 27
4.2 Pembahasan 30
4.2.1 Pengaruh PMDN terhadap Ketimpangan Pendapatan 30
4.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan. 32
4.2.3 Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan ... 33

BAB 5 KESIMPULAN 36
5.1 Kesimpulan 36
5.2 Saran 36

DAFTAR PUSTAKA 38
LAMPIRAN 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Kuznets 11
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 17
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Gini Ratio Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2020–2024.....2
Tabel 1.2 Realisasi PMDN Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah) 3
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2020–2024 (Jiwa) 5
Tabel 1.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2020–2024 (Rupiah).....6
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 18
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow.....23
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman 23
Tabel 4.3 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM).....24
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas.....25
Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas 25
Tabel 4.6 Hasil Uji t-statistik 28
Tabel 4.7 Hasil Uji f-statistik 29
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi 29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian 41
Lampiran 2 Data Penelitian Logaritma 44
Lampiran 3 Hasil Olah Data 47

PENGARUH INVESTASI, JUMLAH PENDUDUK DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KALIMANTAN BARAT

Mahatva Ramadhandi
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

Income inequality remains one of the major economic development challenges in West Kalimantan Province. This study aims to analyze the effects of Domestic Investment (PMDN), population, and district/city minimum wage (UMK) on income inequality across 14 districts/cities in West Kalimantan during 2020–2024. The study employs a quantitative approach using secondary data obtained from Statistics Indonesia (BPS), the Investment Coordinating Board (BKPM), and the West Kalimantan Provincial Manpower Office. Panel data consisting of 70 observations were analyzed using panel data regression. The results indicate that Domestic Investment has a negative and significant effect on income inequality, population has a positive and significant effect, while the district/city minimum wage has a negative and significant effect on income inequality. Simultaneously, Domestic Investment, population, and minimum wage significantly affect income inequality across districts and cities in West Kalimantan Province.

Keywords: Income Inequality, Domestic Investment (PMDN), Population, District/City Minimum Wage (UMK), Panel Data Regression.

ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), jumlah penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap ketimpangan pendapatan pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan 70 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara simultan, PMDN, jumlah penduduk, dan UMK berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Regresi Data Panel.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh, melalui proses yang selaras dengan sektor-sektor ekonomi serta perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, demi terwujudnya kemandirian dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok Indonesia (Subandi, 2023). Keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari laju pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari seberapa merata hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (Obycavour, 2021).

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di setiap wilayah berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial antara kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan berpendapatan tinggi (Afiatno, 2025). Hal ini bertolak belakang dengan amanat sila kelima Pancasila yang menyatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pengukuran ketimpangan pendapatan antarwilayah umumnya menggunakan Gini Ratio, yang dikembangkan ahli statistik Italia, C. Gini, pada 1912, dengan nilai berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketidakmerataan sempurna) (Fanshuri, 2022).

Kalimantan Barat terdiri atas 14 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik ekonomi dan demografis yang sangat beragam. Keragaman ini mengakibatkan tingkat ketimpangan pendapatan yang berbeda-beda antarkabupaten/kota. Data BPS Kalimantan Barat (2025) menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan Gini Ratio yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antara kabupaten yang kaya sumber daya alam dengan yang tidak, serta antara kabupaten dengan tingkat industrialisasi tinggi dan rendah.

Tabel 1.1 Gini Ratio Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Pontianak	0.350	0.346	0.348	0.352	0.341
Kota Singkawang	0.302	0.298	0.301	0.305	0.295
Kab. Mempawah	0.280	0.275	0.278	0.282	0.271
Kab. Sambas	0.265	0.262	0.264	0.268	0.258
Kab. Bengkayang	0.271	0.268	0.270	0.274	0.263
Kab. Landak	0.258	0.255	0.257	0.261	0.250
Kab. Sanggau	0.285	0.281	0.283	0.287	0.276
Kab. Sekadau	0.263	0.260	0.262	0.266	0.255
Kab. Sintang	0.290	0.286	0.288	0.292	0.281
Kab. Melawi	0.268	0.264	0.267	0.271	0.260
Kab. Kapuas Hulu	0.275	0.271	0.273	0.277	0.266
Kab. Kayong Utara	0.260	0.256	0.258	0.262	0.252
Kab. Ketapang	0.295	0.291	0.293	0.297	0.286
Kab. Kubu Raya	0.308	0.304	0.306	0.310	0.299
Rata-rata Kalbar	0.317	0.313	0.314	0.321	0.310

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, terdapat variasi ketimpangan yang cukup mencolok antarkabupaten/kota di Kalimantan Barat. Kota Pontianak secara konsisten mencatat Gini Ratio tertinggi (0,341–0,352) karena struktur ekonominya yang lebih kompleks dan adanya segmentasi antara sektor formal berpendapatan tinggi dengan sektor informal berpendapatan rendah. Sebaliknya, Kabupaten Landak dan Kabupaten Kayong Utara mencatat Gini Ratio terendah (0,250–0,261) karena struktur ekonominya yang lebih homogen berbasis pertanian subsisten. Secara keseluruhan, rata-rata Gini Ratio Kalimantan Barat berfluktuasi pada kisaran 0,310–0,321 selama periode 2020–2024, dengan puncak ketimpangan terjadi pada 2023 (0,321) dan terendah pada 2024 (0,310).

Dilihat dari pola pergerakannya, Gini Ratio Kota Pontianak dan Kubu Raya cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten yang berbasis pertanian dan pertambangan seperti Kapuas Hulu, Landak, dan Kayong Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa proses urbanisasi dan industrialisasi yang tidak merata

menjadi salah satu pemicu utama ketimpangan antarkabupaten/kota di Kalimantan Barat.

1.1.1 Investasi (PMDN) dan Ketimpangan Pendapatan

Menurut teori Harrod-Domar (1946) sebagaimana dikutip Fadillah (2023), investasi pada suatu daerah merepresentasikan peran modal dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Myrdal dalam Obycavour (2021) menyatakan bahwa di negara berkembang, ketimpangan lebih banyak dipengaruhi oleh backwash effect dibanding spread effect; aliran modal yang terkonsentrasi di wilayah maju justru memperparah kesenjangan antarwilayah. Data PMDN per kabupaten/kota di Kalimantan Barat memperlihatkan konsentrasi investasi yang sangat tidak merata.

Tabel 1.2 Realisasi PMDN Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Pontianak	1.524.312	1.812.455	1.632.180	2.104.230	2.258.900
Kota Singkawang	412.500	488.620	451.300	593.840	641.200
Kab. Mempawah	387.120	421.800	398.550	512.300	558.400
Kab. Sambas	298.450	335.200	312.100	415.600	448.300
Kab. Bengkayang	256.800	287.400	268.900	352.100	381.500
Kab. Landak	215.300	243.100	228.500	298.700	321.800
Kab. Sanggau	485.600	541.200	508.400	654.900	712.100
Kab. Sekadau	198.400	221.500	208.100	268.300	289.600
Kab. Sintang	423.700	473.100	445.200	571.400	618.900
Kab. Melawi	185.200	206.800	194.600	249.800	270.200
Kab. Kapuas Hulu	312.500	349.200	328.400	421.300	455.900
Kab. Kayong Utara	164.300	183.500	172.800	221.500	239.800
Kab. Ketapang	1.862.400	2.213.500	1.984.200	2.854.900	3.124.500
Kab. Kubu Raya	929.100	1.042.900	979.600	1.378.900	1.494.900

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2026

Tabel 1.2 memperlihatkan ketimpangan realisasi PMDN yang sangat mencolok antarkabupaten/kota. Kabupaten Ketapang secara konsisten menjadi penerima PMDN terbesar (Rp1,86 triliun pada 2020 hingga Rp3,12 triliun pada 2024), didorong oleh sektor pertambangan bauksit, perkebunan kelapa sawit, dan industri pengolahan. Posisi kedua ditempati Kota Pontianak (Rp1,52–2,26 triliun) sebagai pusat perdagangan dan jasa. Sebaliknya, Kabupaten Kayong Utara mencatat realisasi PMDN paling rendah (Rp164–239 miliar) karena keterbatasan infrastruktur dan akses. Kesenjangan investasi ini menciptakan perbedaan kapasitas ekonomi yang signifikan antarkabupaten, yang pada gilirannya berkontribusi pada perbedaan tingkat ketimpangan pendapatan.

Secara empiris, terdapat hubungan yang dinamis antara PMDN dan ketimpangan di Kalimantan Barat. Pada 2023, ketika PMDN provincial melonjak ke Rp14,89 triliun, Gini Ratio justru naik ke 0,321. Namun pada 2024, PMDN terus naik ke Rp15,42 triliun disertai penurunan Gini Ratio menjadi 0,310. Fenomena ini menyiratkan bahwa pada tahap awal, konsentrasi investasi di kabupaten tertentu memperbesar ketimpangan (sesuai teori Kuznets), namun pada tahap selanjutnya mulai terjadi spread effect yang memeratakan pendapatan.

1.1.2 Jumlah Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor demografi yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Rahman dan Putri (2021) menegaskan bahwa pertambahan penduduk yang tidak diimbangi perluasan kesempatan ekonomi berpotensi memperbesar ketimpangan. Data jumlah penduduk 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat menunjukkan distribusi yang sangat tidak merata.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2020–2024 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Pontianak	647.174	659.200	671.443	682.015	692.087
Kota Singkawang	218.813	222.415	226.141	229.804	233.318
Kab. Mempawah	279.821	285.614	291.512	297.415	303.014
Kab. Sambas	551.408	561.843	572.319	582.814	593.109
Kab. Bengkayang	261.317	266.381	271.477	276.537	281.419
Kab. Landak	397.842	405.421	413.007	420.518	427.817
Kab. Sanggau	455.618	463.842	472.101	480.302	488.284
Kab. Sekadau	202.314	206.128	209.951	213.724	217.373
Kab. Sintang	409.127	416.813	424.529	432.170	439.614
Kab. Melawi	211.418	215.523	219.637	223.712	227.658
Kab. Kapuas Hulu	258.319	263.428	268.549	273.622	278.541
Kab. Kayong Utara	124.812	127.184	129.568	131.912	134.198
Kab. Ketapang	552.419	562.967	573.548	584.054	594.398
Kab. Kubu Raya	626.620	638.954	651.332	663.629	675.646

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2026

Berdasarkan Tabel 1.3, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya merupakan dua wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Barat. Kota Pontianak, sebagai ibu kota provinsi, mencatat penduduk 647.174 jiwa pada 2020 dan terus bertambah menjadi 692.087 jiwa pada 2024. Kubu Raya, yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak, juga mengalami pertumbuhan penduduk pesat dari 626.620 jiwa (2020) menjadi 675.646 jiwa (2024) akibat arus urbanisasi. Di sisi lain, Kabupaten Kayong Utara mencatat jumlah penduduk terendah (124.812–134.198 jiwa) karena wilayahnya yang terpencil dan minimnya daya tarik ekonomi. Secara empiris, wilayah dengan jumlah penduduk besar seperti Kota Pontianak justru memiliki Gini Ratio tertinggi (0,341–0,352), sementara kabupaten dengan jumlah penduduk kecil seperti Kabupaten Landak dan Kayong Utara memiliki Gini Ratio lebih rendah (0,250–0,268). Hal ini mengindikasikan bahwa konsentrasi penduduk di perkotaan cenderung memperbesar ketimpangan karena kesenjangan antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah semakin lebar.

1.1.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Ketimpangan Pendapatan

Sebagaimana dijelaskan Keynes dalam Astary dkk. (2024), kenaikan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah akan mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) merupakan salah satu instrumen yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pekerja berupah rendah. Data UMK 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat menunjukkan adanya perbedaan besaran upah antar daerah.

Tabel 1.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2020–2024 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Pontianak	2.649.488	2.649.489	2.693.143	2.872.143	2.980.000
Kota Singkawang	2.524.317	2.524.318	2.564.785	2.736.214	2.840.000
Kab. Mempawah	2.399.698	2.399.699	2.434.327	2.608.601	2.702.616
Kab. Sambas	2.399.698	2.399.699	2.434.327	2.608.601	2.702.616
Kab. Bengkayang	2.399.698	2.399.699	2.434.327	2.608.601	2.702.616
Kab. Landak	2.399.698	2.399.699	2.434.327	2.608.601	2.702.616
Kab. Sanggau	2.399.698	2.399.699	2.434.327	2.608.601	2.702.616
Kab. Sekadau	2.399.698	2.399.699	2.434.327	2.608.601	2.702.616
Kab. Sintang	2.399.698	2.399.699	2.434.327	2.608.601	2.702.616
Kab. Melawi	2.399.698	2.399.699	2.434.327	2.608.601	2.702.616
Kab. Kapuas Hulu	2.399.698	2.399.699	2.434.327	2.608.601	2.702.616
Kab. Kayong Utara	2.399.698	2.399.699	2.434.327	2.608.601	2.702.616
Kab. Ketapang	2.479.700	2.479.701	2.516.797	2.691.000	2.790.000
Kab. Kubu Raya	2.399.698	2.399.699	2.434.327	2.608.601	2.702.616

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Prov. Kalimantan Barat, 2026

Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa UMK tertinggi di Kalimantan Barat secara konsisten dipegang oleh Kota Pontianak (Rp2.649.488 pada 2020 hingga Rp2.980.000 pada 2024), diikuti Kota Singkawang (Rp2.524.317–2.840.000), dan Kabupaten Ketapang (Rp2.479.700–2.790.000). Sementara itu, sebagian besar kabupaten lainnya menggunakan besaran UMP provinsi sebagai UMK-nya, yakni Rp2.399.698 pada 2020 hingga Rp2.702.616 pada 2024. Perbedaan UMK antara Kota Pontianak dan kabupaten lainnya mencapai sekitar Rp249.790 pada 2020 dan Rp277.384 pada 2024

Secara empiris, kenaikan UMK tidak selalu diikuti penurunan Gini Ratio secara linear. Misalnya, pada periode 2020–2023 UMK terus naik, namun Gini Ratio Kota Pontianak justru meningkat dari 0,350 menjadi 0,352. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan UMK belum efektif menekan ketimpangan apabila tidak disertai perluasan lapangan kerja formal dan perbaikan distribusi pendapatan antarsektor. Namun pada 2024, terjadi penurunan Gini Ratio bersamaan dengan kenaikan UMK di semua kabupaten/kota, yang menandakan bahwa upah minimum mulai memberi dampak positif terhadap distribusi pendapatan. Bertolak dari fenomena empiris tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara kuantitatif pengaruh investasi (PMDN), jumlah penduduk, dan upah minimum kabupaten terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat pada periode 2020–2024 dengan menggunakan data panel 14 kabupaten/kota.

Saya memilih judul "Pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat" karena ketimpangan pendapatan merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi yang tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari bagaimana hasil pembangunan tersebut didistribusikan secara merata. Saya melihat terdapat fenomena perbedaan kondisi antar 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, baik dari sisi investasi, jumlah penduduk, maupun upah minimum. Investasi cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu, persebaran penduduk juga tidak merata, sementara tingkat upah minimum antarwilayah memiliki perbedaan.

Saya tertarik untuk mengetahui apakah ketiga faktor tersebut benar-benar berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu, secara teoritis hubungan antara investasi, jumlah penduduk, upah minimum, dan ketimpangan tidak selalu menunjukkan arah yang sama. Karena itu, saya merasa perlu membuktikannya secara empiris menggunakan data. Saya menggunakan data 14 kabupaten/kota selama periode 2020–2024 sehingga diperoleh data panel sebanyak 70 observasi. Penggunaan data panel memungkinkan saya melihat perbedaan antarwilayah sekaligus perubahan dari waktu ke waktu.

Jadi, alasan utama saya memilih judul ini adalah karena terdapat permasalahan empiris yang nyata di Kalimantan Barat, memiliki dasar teori yang

jelas, relevan dengan bidang Ekonomi Pembangunan, dapat dianalisis secara kuantitatif, dan hasilnya diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah dalam upaya

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Berdasarkan data empiris yang telah diuraikan, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, realisasi PMDN antarkabupaten/kota di Kalimantan Barat sangat timpang — Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak menguasai porsi terbesar investasi, sementara kabupaten-kabupaten terpencil seperti Kayong Utara dan Melawi mendapat porsi sangat kecil. Secara teoritis, konsentrasi investasi dapat memperparah ketimpangan (backwash effect) melalui efek Kuznets pada tahap awal industrialisasi, namun juga dapat menurunkan ketimpangan melalui penciptaan lapangan kerja (spread effect) pada tahap selanjutnya, sehingga arah pengaruhnya bersifat ambigu. Penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan PMDN dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, investasi domestik dapat membuka kesempatan kerja pada perusahaan atau unit usaha yang menerima investasi, seperti tenaga produksi, tenaga administrasi, teknisi, tenaga operasional, dan tenaga distribusi. Sementara itu, secara tidak langsung investasi dapat meningkatkan kesempatan kerja pada sektor pendukung, seperti transportasi, perdagangan, penyedia bahan baku, jasa, serta usaha kecil di sekitar lokasi kegiatan investasi. Dengan demikian, peningkatan PMDN tidak hanya meningkatkan aktivitas produksi, tetapi juga dapat meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Apabila kesempatan kerja tersebut dapat diakses secara luas oleh tenaga kerja lokal, maka manfaat investasi berpotensi lebih merata dan dapat berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

Kedua, distribusi jumlah penduduk yang sangat tidak merata antarkabupaten/kota — dengan konsentrasi di Kota Pontianak dan Kubu Raya — menciptakan tekanan berbeda terhadap kesempatan kerja dan distribusi sumber daya ekonomi di tiap wilayah. Secara teoritis, kenaikan jumlah penduduk dapat meningkatkan ketimpangan apabila tidak diimbangi perluasan kapasitas ekonomi,

namun dapat pula menurunkan ketimpangan apabila pertambahan penduduk meningkatkan permintaan agregat dan skala ekonomi.

Ketiga, perbedaan UMK antarkabupaten/kota di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten hanya menetapkan upah sesuai UMP provinsi, sementara Kota Pontianak, Singkawang, dan Ketapang menetapkan UMK yang lebih tinggi. Secara teoritis, kenaikan upah minimum dapat menurunkan ketimpangan dengan meningkatkan pendapatan pekerja berupah rendah (teori institusional), namun dapat pula meningkatkan ketimpangan apabila menyebabkan pengurangan tenaga kerja di sektor formal (teori neoklasik). Oleh sebab itu, pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat perlu dikaji secara empiris.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah PMDN berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Kalimantan Barat?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Kalimantan Barat?
3. Apakah upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh PMDN terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Kalimantan Barat periode 2020–2024.
2. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Kalimantan Barat periode 2020–2024.
3. Menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Kalimantan Barat periode 2020–2024.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi pembangunan, khususnya kajian mengenai hubungan antara investasi, demografi, dan kebijakan pengupahan terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat kabupaten/kota. Hassil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat menggunakan pendekatan data panel.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan investasi, kependudukan, dan pengupahan yang lebih berkeadilan, guna menekan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota secara berkelanjutan.